

## Opini BPK Jadi Senjata Lawan Politik

**Hanoto**

Borneo Tribune, *Sungai Raya*

Opini BPK RI mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan daerah kerap dijadikan ajang politisasi lawan bagi politik kepala daerah.

"Akibatnya kepala daerah atau bupati akan menjadi kewalahan dalam menghadapinya," keluh Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo.

Apalagi kalau BPK RI itu menyatakan keuangan daerah disclaimer opinion (tidak memberikan pendapat) bahkan hingga pada adverse opinion (tidak wajar), maka akan terbuka peluang untuk dimanfaatkan.

"Berbagai opini pun terbentuk di masyarakat bahwa kepala daerah tidak mampu mengelola keuangan daerahnya dalam menjalankan amanah yang diembannya," ujarnya.

Namun sebaliknya, lanjut Sujiwo yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kubu Raya

ini, jika opini yang diberikan BPK RI adalah unqualified opinion (wajar tanpa pengecualian) dan wajar dengan pengecualian (qualified opinion), masyarakat pun akan menilai kepala daerah mampu mengelola keuangan daerah.

Menurut dia, kondisi ini akan menjadi preseden buruk bagi proses pembangunan daerah. "Perlu sikap yang bijak dalam menyikapi opini BPK RI, sehingga tidak menjadi polemik baik dari sisi politis maupun opini di masyarakat," harap Sujiwo.

Permasalahan yang mempengaruhi opini yakni belum adanya inventarisasi dan penilaian aset tetap. Penyajian piutang tidak didukung bukti dan SPPD fiktif hingga pada kas yang tekor. "Karena itu bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan pada PP 24 tahun 2005," jelasnya. □